

BAB III

PEMBAHASAN

REKRUTMEN POLITIK DAN FENOMENA POLITIK KEKERABATAN DI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS REKRUTMEN POLITIK DPD TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014-2019)

Partai politik merupakan organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Salah satu partai yang besar di Indonesia dan merupakan Partai yang sudah dianggap baik adalah partai Golongan Karya. Kita semua hampir tau bagaimana partai ini berdiri, dengan sepak terjang dari awal pertama berdirinya yang tidak mempunyai embel-embel partai dan hingga sekarang konsisten untuk menjadi sebuah partai yang sampai sekarang kita kenal dengan Partai Golkar. Di Sulawesi Selatan khususnya partai ini memang sangat eksis dikenal oleh masyarakat. Popularitas partai Golkar hampir dibilang sangat tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain. Bahkan kebanyakan dari elite-elitk politik baik dibagian legislatif dan juga eksekutif banyak berasal dari Partai Golkar. Hal ini bisa membuktikan bahwa rekrutmen politik Golkar dan pengkaderannya dianggap baik di Sulawesi Selatan.

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data maka diperoleh hasil penelitian yang berkaitan dengan rekrutmen politik dan fenomena politik kekerabatan di sulawesi selatan, pengumpulan data dalam penelitina ini diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai politik golkar DPD tingkat I, Anggota DPR Provinsi Sul-Sel dan beberapa masyarakat umum. Untuk mengetahui fungsi rekrutmen partai Golkar maka akan dianalisis melalui tiga tahap dengan memakai teori dari Syamsuddin Haris menyatakan perekrutan anggota legislatif oleh partai secara umum mencakup tiga tahap yaitu

3.1 Mekanisme Perekrutan Calon Legislatif Partai Golkar

3.1.1 Penjaringan Calon Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014

Penjaringan calon yang dimaksud adalah dimana tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai baik ditingkat Desa/ Kelurahan atau ranting partai dengan elite partai ditingkat atasnya atau anak cabang. Dalam perspektif Partai Golkar setiap kader Partai Golkar harus memiliki kompetensi dan keahlian profesional. Kompetensi, skill yang profesional diartikan sebagai tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang kader dalam mengaktualisasikan doktrin dan kebijakan partai dalam mengembangkan misi partai menuju pencapaian tujuan dan cita-cita ideal perjuangan partai. Sesuai dengan program kerja bidang kaderisasi dan keanggotaan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan kompetensi yang harus dimiliki setiap Kader Golkar meliputi:

- **Kompetensi Ideologi**, yaitu kemampuan setiap kader dalam memahami sikap dasar Partai Golkar.
- **Kompetensi Politik**, yaitu kemampuan setiap kader dibidang politik untuk mengetahui tentang negara dan semua aspeknya.
- **Kompetensi Ke-Golkar-an**, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan setiap kader dalam mengaktualisasikan doktrin, program kerja dan kebijakan partai.
- **Kompetensi Kepemimpinan**, yaitu kemampuan organisatoris secara praktis bagi setiap kader, agar mampu memajukan dan mengemban misi partai di berbagai bidang.
- **Kompetensi Keprofesionalan**, yaitu kemampuan setiap kader dalam mengaktualisasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang profesional yang dimilikinya, sesuai bidang keahlian masing-masing.

Untuk merespon program umum Partai Golkar, khususnya di Bidang Kaderisasi

dan Keanggotaan, meliputi pengembangan potensi kader, maka berdasarkan kebijakan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, yang mana selama ini tersosialisasi lewat kegiatan “Yellow Night”, yaitu kegiatan workshop singkat Partai Golkar Sulawesi Selatan sebagai bentuk penyegaran wawasan politik kader Golkar di Sulawesi Selatan pada masa Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan¹. bahwa dalam kaitan mewujudkan cita- cita ideal partai, maka setiap kader harus memiliki potensi dan kompetensi dengan pendekatan pada rumusan ”**Paku Besi**”, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

- a) **Perencanaan**, yaitu bahwa kemampuan seorang kader dalam mengawali aktifitas apapun dilakukannya, harus di dahului dengan perencanaan matang, karena melakukan aktifitas tanpa perencanaan, sama saja berjalan tanpa arah dan tujuan.
- b) **Antusias**, adalah bahwa salah satu potensi yang harus dimiliki seorang kader dalam melakukan aktifitas berdasar keyakinan tinggi bahwa apa yang akan dikerjakannya akan berhasil, sebagaimana ungkapan filosof, Al-Farabi, bahwa "*Antusiasme dapat mengalahkan Kekuasaan dan Harta*".
- c) **Konsisten**, yaitu bahwa seorang kader senantiasa memiliki dan memelihara komitmen dan konsistensinya, tidak hanya pada tataran ucapan tetapi lebih terpenting lagi konsisten dan komitmen pada diri sendiri membesarkan Partai Golkar.
- d) **Ulet**, yaitu bahwa seorang kader harus memiliki ketekunan untuk memperjuangkan sesuatu, memiliki daya tahan terhadap berbagai tekanan dan hambatan, dan tidak cepat berputus asa dalam menghadapi rintangan dan ancaman.
- e) **Berani**, yaitu bahwa seorang kader harus memiliki kemauan untuk

¹ Wawancara dengan Bapak Abdillah Natsir, (Sekertaris DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan), 27/11/17.

berjuang keras, tidak akan gentar menghadapi kesulitan dan tantangan untuk mencapai tujuan, serta berani mengambil resiko jika itu diyakini kebenarannya.

- f) **Evaluasi**, yaitu bahwa seorang kader yang ingin aktifitasnya berhasil dengan baik, maka semua aktivitas dilakukannya harus selalu di monitoring dan di evaluasi demi terciptanya hasil program yang maksimal dengan berbasis kinerja.
- g) **Sensitif**, yaitu bahwa setiap kader harus memiliki sensitifitas dan kepekaan tinggi membaca tanda-tanda perubahan zaman dan kepentingan masyarakat untuk disalurkan dan diperjuangkan melalui mekanisme partai.
- h) **Inovatif**, yaitu bahwa setiap kader harus memiliki keunggulan kompetitif untuk mampu mendorong dinamika sosial dan melakukan perubahan secara cerdas berdasar gagasan, ide dan kreasi masing-masing sesuai kebutuhan.

Terlepas dari kebijakan diatas, Partai Golkar juga membentuk tim khusus dalam penjaringan calon-calon legislatif, dan Partai Golkar juga sangat mengutamakan kader-kader yang sudah lama bergabung di dalam Partai Golkar untuk dicalonkan menjadi calon legislatif seperti yang diungkapkan bapak H. Moh.Roem,SH, M.si selaku Ketua Harian Partai Golkar, beliau menyatakan:

“ di dalam penjaringan calon kader Partai Golkar tidak memandang status dari para calon, misalnya apakah calon tersebut berasal dari keturunan para elite politik. yang jelas, para calon kader memahami tujuan partai, memiliki KTA, sertifikat dan juga paham akan politik. walaupun ini memang masuk kedalam kasus dinasti tetapi selama kader tersebut layak untuk masuk menjadi calon legislatif yah sah-sah saja. untuk mekanisme penjaringan ada tim khusus yang

bertugas menjaring kader kita yang pertama penjaringan tingkat kecamatan, penjaringan tingkat kabupaten/kota, penjaringan tingkat provinsi dan kemudian pemaparan visi misi bakal calon kabupaten/kota dikota makassar dan kami menggunakan mekanisme terbuka”²

Pernyataan tersebut juga hampir sama ketika mewawancarai salah satu anggota DPR Provinsi beliau menyatakan

“ Partai Golkar memberikan kesempatan bagi kadernya disetiap wilayah untuk mendaftarkan diri menjadi caleg, dan mekanisme ini kami anggap baik dan demokratis”³

Namun terkait dengan penajaringan calon legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar cenderung mengutamakan kader-kader yang sudah lama didalam Partai Golkar tanpa melihat sisi dari keturunannya, maka hal itu memang membuka banyak kesempatan bagi para keturunan elite-elite politik untuk bergabung ke dalam Partai. Sesuai dengan tabel 1.2 di dalam data pemenang pemilu legislatif Partai Golkar yang lolos dalam pemilihan Legislatif tersebut memang hampir kebanyakan dari keturunan elite politik. Namun, tanggapan dari salah satu masyarakat yang bernama Andi. Akil SH, Dg Beta menyatakan

“ memang tidak ada salahnya jika dinasti politik itu belum sampai ke dalam kasus KKN namun, hampir mendekati. Menurut saya, memang harusnya partai politik memilah- milih siapa yang akan dijadikan atau ditetapkan menjadi calon legislatif jangan itu-itu saja. apa gunanya melakukan kaderisasi dan persiapan lama-lama namun yang ditetapkan itu-itu lagi, apakah yang dikader keturunan itu saja”⁴

Analisis terhadap penjaringan calon kader partai Golkar, bisa dikatakan partai ini menggunakan sistem rekrutmen tertutup seperti yang dikatakan Affan Gaffar:

“ rekrutmen yang bersifat tertutup peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh

² Wawancara dengan H. Moh. Roem, SH, M.Si (Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2014-2019), Makassar, 7 Oktober 2017.

³ Wawancara dengan Dr. H. Sindawa Tarrang, SH, MM, MH, (Ketua Bidang PP wilayah Gowa Takalar (Wil.III).

⁴ Wawancara dengan Andi. Akil SH, Dg Beta, (Masyarakat) Malino 19 Oktober 2017.

pihak-pihak tertentu saja”⁵

walaupun dari hasil wawancara dikatakan proses rekrutmennya dilakukan secara terbuka namun fakta yang ditemukan dalam hasil wawancara sepenuhnya tidak, hal ini dibuktikan dari kedua hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa Partai Golkar lebih mengutamakan kader-kader yang sudah lama mengabdikan di dalam Partai Golkar. Walaupun persyaratan untuk bergabung di Partai Golkar harus mengikuti mekanisme fungsionaris dan harus mengikuti kompetisi-kompetisi yang sudah diatur dalam AD/ART partai Golkar sendiri. Namun, jika penjurangan hanya dilakukan lebih besar di dalam internal partai saja maka nantinya akan menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat-masyarakat yang berasal dari eksternal partai untuk bergabung di dalam Partai Golkar.

Hal ini juga membuka peluang besar bagi para kader-kader untuk mengajak keluarganya ikut masuk dan mengabdikan di Partai Golkar agar bisa menjadi calon-calon kepala daerah dan juga calon legislatif di setiap daerah. Apalagi, jika klan tersebut mempunyai kekuasaan penuh di dalam internal partai Golkar itu sendiri. Dari akibat pola rekrutmen yang seperti ini akan menimbulkan *pertama* membentuk anggota DPR sangat akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya. Bisa dibilang, para kader menjadi bermuka dua hanya untuk mencari hati bagi pemimpin partainya. *Kedua* para calon-calon legislatif akan mengorbankan kualitas untuk menjadi kepala daerah ataupun duduk di kursi legislatif dan mengutamakan keluarganya. Sehingga nantinya akan membawa akibat yang buruk bagi rekrutmen partai. Seperti yang dikatakan Bille dalam buku *handbook of party politics*:

“ *sebagian besar partai telah mengalami sedikit perubahan dalam tingkat pengambilan keputusan dalam proses seleksi calon selama era ini*”⁶.

⁵ Afwan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1999, hal.155-156.

⁶ Lats Bille (2001) 'democratizing a democratic procedure: myth or reality? Candidate selection in western european parties, 1960-1990', *party politics*, 7: 363-80.

Dari apa yang menjadi kekurangan dalam penjaringan kader pada Partai Golkar tidak berarti bahwa cara penjaringan kader dalam partai ini dikatakan tidak baik. Justru, cara penjaringan seperti ini akan membuat para kader-kader lebih matang untuk berkompetisi baik dalam kursi eksekutif dan juga legislatif.

3.1.2. Penyaringan Dan Seleksi Calon Yang Telah Dijaring.

Partai Golkar merupakan partai yang berpengalaman dalam pemilu, seakan dan tidak ingin gegabah dalam melakukan rekrutmen politik. Partai Golkarpun memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif.
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar.
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Kriteria-kriteria di atas merupakan bukan satu-satunya penyaring bagi para Caleg dari Partai Golkar karena para Caleg harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu. Saringan berikutnya salah satunya adalah Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar:

1. Tata Cara Penentuan

Dalam rangka menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.

a. Aspek Pengabdian

Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam Partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang di dirikan maupun yang mendirikan.

b. Aspek Elektabilitas

Elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa. Hal ini dinilai pada aspek ini adalah hasil survei Elektabilitas terbaru di daerah pemilihan.

c. Aspek Penugasan Fungsionaris; (laporan kegiatan penugasan)

Penugasan Fungsionaris, adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsionaris Partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing-masing.

d. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian.

2. Tata Cara Pembobotan

Berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota Partai Golkar, tata cara pembobotan calon anggota legislatif terbagi dalam tiga sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tata cara pembobotan untuk calon anggota DRR-RI

No	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Elektabilitas	30
3.	Penugasan Fungsiionaris	20
4.	Pendidikan	10

Sumber: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013

Tabel 3.2 Tata cara pembobotan untuk calon anggota DPRD Propinsi

No	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
3.	Penugasan Fungsiionaris	30
4.	Pendidikan	30

Sumber: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013

Tabel 3.3 Tata cara pembobotan untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

No	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
3.	Penugasan Fungsiionaris	30

4.	Pendidikan	30
----	------------	----

3. Tata Cara Penilaian

a. Pengabdian

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di partai, fraksi, Ormas mendirikan dan didirikan, orrganisasi sayap, Badan Lembaga dengan nilai 0-100.

a. Elektabilitas

Elektabilitas diperoleh dari peringkat hasil survei per daerah pemilihan dengan skala 0-100.

b. Penugasan Fungsionaris

Penilaian penugasan fungsionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan konsolidasi partai, memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing—masing, dengan nilai 0-100.

c. Pendidikan

Penilaian pendidikan didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai

Calon DPR-RI : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50

Calon DPRD Propinsi : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50, D.3 = 25

Calon DPRD Kab/Kota : S.3 = 100, S.2 = 80, S.1 = 60, D.3 = 40, SMA = 20

Untuk sumber-sumber rekrutmen itu sendiri partai Golkar secara nasional menyebutkan ada 6 (enam) sumber rekrutmen diantaranya sebagai berikut;

1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan

2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar
4. Organisasi Sayap Partai Golkar
5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar
6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembobotan aspek pengabdian dinilai sangat tinggi, dalam keputusan DPP berkaitan dengan sumber rekrutmen bakal calon legislatif dari keenam sumber yang tertuang dalam keputusan tersebut hanya satu sumber yang tidak secara langsung memiliki hubungan dengan Partai Golkar sedangkan kelima sumber lainnya berasal dari intern partai Golkar. Dengan komposisi ini membuat kader-kader partai Golkar diuntungkan karena partai lebih mengutamakan kadernya untuk ditempatkan baik itu di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Meskipun menguntungkan bagi kader Partai Golkar, namun partai Golkar juga mempunyai kriteria penilaian tersendiri untuk melakukan seleksi kader-kader yang berkualitas karena tidak sembarangan kader akan dengan mudah mendapatkan promosi jabatan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Setiap bakal calon anggota legislatif sesuai dengan keputusan DPP Partai Golkar harus melalui serangkaian proses sebelum akhirnya bertarung dalam Pemilu, adapun serangkaian proses tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi kepada seluruh kader fungsionaris yang telah mengikuti orientasi fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Provinsi Periode 2009-2015.

- b. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi menetapkan daftar bakal calon dalam daerah pemilihan berdasarkan surat pernyataan kesediaan yang diterima dari fungsionaris pusat/daerah provinsi terkait, sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
- c. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) disusun secara Alfabatis dengan memperhatikan keterwakilan 30% kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai.
- d. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada butir (b) disusun secara Alfabatis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.
- e. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada butir (b) dikirim kepada ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan/pertimbangan.
- f. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima daftar bakal calon dari DPD Partai Golkar Provinsi untuk mengembalikan daftar bakal calon dimaksud, disertai catatan/pertimbangan (bilamana ada).
- g. Tim seleksi menyusun daftar calon sementara (DCS) berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini.
- h. Dewan pertimbangan DPD Partai Golkar provinsi memberikan pertimbangan terhadap DCS yang disusun oleh tim seleksi.
- i. Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud dalam poin (g) dikonsultasikan kepada ketua umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
- j. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- k. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam daftar DCS.

- l. DCS anggota DPRD Propinsi diserahkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi ke KPUD Provinsi.
- m. Penerapan Daftar calon Tetap dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Provinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.

Setelah memenuhi persyaratan diatas maka diberikanlah pendidikan dan pelatihan khusus dari Golkar, adapun materi-materi yang diberikan adalah:

- a) Materi Dasar (Kompetensi Politik)
 - Kewarganegaraan, Pancasila dan UUD 1945.
 - Sistem multi partai, UU Politik dan UU pemilu.
- b) Materi Pokok (Kompetensi ke-Golkar-an)
 - Doktrin dan ideologi ke-Golkar-an.
 - Sejarah dan perkembangan Partai Golkar.
 - Pokok-pokok kebijakan Partai Golkar.
- c) Materi Keorganisasian
 - Pengelolaan Partai sebagai Partai Modern.
 - Kepemimpinan yang efektif.
 - Manajemen konflik.
 - Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
 - Komunikasi politik.
 - Publik speaking.

- Strategi Pemenangan Pemilu.
- Manajemen Kampanye.

d) Materi Umum

- Ekonomi dan kebijakan kesejahteraan.
- Penanggulangan Kemiskinan.
- HAM.
- Sikap Partai terhadap Isu-isu aktual.
- Perubahan iklim dan lingkungan hidup.

e) Materi Khusus

Sesuai dengan karakteristik kelompok fungsional dan kepentingan penggalangan.

Seperti:

- Kader Penggalang : rescue and security.
- Kader Penggerak Pemerintah : Konsolidasi Kebijakan dan good governance.
- Perempuan : Kebijakan Gender.

Materi TOT Perkaderan

a. Materi Dasar

- Ideologi dan Konstitusi Negara.
- Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Politik.

b. Materi Pokok

- Sejarah, Doktrin dan Paradigma Partai Golkar.
- Kebijakan dan Program Partai Golkar.
- Kedudukan dan Program Partai Golkar.

- c.** Materi Keterampilan Organisasi
 - Manajemen Organisasi dengan Pendekatan Baku Besi.
 - Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
 - Teknik lobby, persuasif dan pencitraan.
 - Komunikasi politik.
- d.** Materi Umum
 - Pengenalan dan Pengendalian Isu.
 - Kebijakan Pembangunan Daerah.
- i.** Materi Khusus
 - Out Bond.

Kemudian sama halnya ditambahkan oleh bapak **H. Moh.Roem,SH, M.si** beliau mengatakan

“ mekanisme perekrutan calon legislatif akan melibatkan organisasi sayap, seperti Angkatan muda Golkar dan musyawarah kekeluargaan gotong royong. Kemudian organisasi ini akan ikut mengajukan nama untuk dijadikan Caleg lalu diproses dalam tim perekrutan. Setelah itu akan diberikan pendidikan dan pelatihan khusus dari Golkar”⁷

Analisis mengenai penyaringan calon yang dijaring oleh Partai Golkar dilakukan proses sertifikasi yang menetapkan siapa yang lolos dan memenuhi syarat untuk dijadikan calon dalam Partai Golkar sudah dibentuk oleh sejumlah faktor. Kebanyakan partai juga memberikan persyaratan secara universal seperti usia, kewarganegaraan dan secara khusus dinilai dari pendidikannya. Partai Golkar sendiripun punya pembobotan khusus terhadap calon yaitu salah satunya mengenai pengabdian dan pengabdian diberi bobot yang paling tinggi, sehingga kembali ke pembahasan awal bahwa lagi-lagi partai Golkar memang selalu mengutamakan kader-kader yang sudah lama mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun dan dibuktikan juga dengan kartu tanda aktif di partai Golkar, artinya bagi siapapun yang sudah

⁷ Wawancara dengan H. Moh. Roem, SH, M.Si (Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2014-2019), Makassar, 7 Oktober 2017

mengabdikan diri di dalam Partai Golkar maka akan besar peluangnya untuk bisa masuk ke dalam ranah eksekutif dan juga legislatif. Dari pola penyaringan ini muncullah pintu untuk melakukan dinasti politik, apalagi tim seleksi para calon legislatif merupakan dari internal Partai Golkar sendiri dan juga tim seleksi dari elite partai sendiri. Menurut penulis, inilah mungkin salah satu jembatan dari awalnya pembentukan dinasti politik yang lolos sampai masuk menjadi calon legislatif maupun kepala daerah. Namun sayang walaupun pengabdian yang menjadi bobot terbesar dalam partai ini, sangat banyak konflik-konflik yang terjadi sesama petinggi-petinggi partai dikarenakan saingan-saingan dalam tubuh partai itu sendiri. Seperti yang dituliskan dalam tesis Titin Purwaningsih dalam partai Golkar mekanisme internal partai kadang membuat aktor berjalan diluar garis kebijakan partai, namun tidak memperoleh sanksi tegas dari partai”⁸ Sebagai contoh, pada saat terjadinya dualisme jabatan Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Namun sekarang jika melihat faktanya, menurut penulis dicopotnya bapak Gubernur Syahrul Yasin Limpo sebagai pengurus partai mungkin hanya untuk memberikan bukti kepada masyarakat khususnya Sulawesi Selatan bahwa Golkar tidak menjadi partai yang menjaring kekerabatan lagi padahal Syahrul Yasin Limpo merupakan elite besar di Partai Golkar sekaligus salah satu pendiri partai Golkar di Sulawesi Selatan. Pencopotan SYL dikarenakan alasan selama 2 periode tidak melakukan musyawarah daerah dan digantikan oleh Nurdin Halid. Namun, ini hanya persepsi penulis dikarenakan di Sulawesi Selatan akan diadakan Pemilihan Gubernur.

Pendidikan juga merupakan pembobotan dalam penyaringan calon legislatif di partai Golkar dengan melihat-melihat nama-nama para Legislatif yang lolos kebanyakan bergelar sarjana dan yang paling tinggi master dari berbagai jurusan. Diluar dari itu, didalam tubuh partai Golkar banyak sekali nama-nama yang bergelar Andi. Di Sulawesi Selatan Andi

⁸ Purwaningsih, Titin, *Op. Cit.*, h. 41.

merupakan gelar bangsawan atau keturunan raja. Tak jarang pula, nama Andi banyak masuk dalam data kekerabatan politik. Mengenai jumlah perempuan juga sudah diatur didalam Ad/Art yang sesuai dengan Undang-undang. Ketentuan tersebut dalam prakteknya memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda didalam peningkatan jumlah calon perempuan. Beruntunglah bagi partai Golkar karena dengan cara sistem yang mementingkan kader-kader yang sudah lama mengabdikan akan juga menghasilkan perempuan-perempuan yang matang dalam berpolitik. Partisipasi perempuan juga sangat berdampak baik sesuai dengan apa yang dikatakan Goetz dan Hassim dengan melihat kuota gender secara tidak langsung membantu melahirkan tiga UU perintis jalan bagi perempuan, UU penghentian kehamilan 1996 dan pada 1998 UU kekerasan dalam rumah tangga⁹. Dalam hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Pamungkas (2011:93) yaitu:

1) Siapa Kandidat yang akan dinominasikan

Kandidat yang dinominasikan oleh Partai Golkar berdasarkan kedekatan emosional, dengan memerhatikan loyalitas serta calon juga memahami nilai atau paham akan apa yang diterapkan oleh Partai Golkar. Namun sayangnya akibat dari kedekatan emosional sendiri Partai Golkar di Sulawesi Selatan bisa dikatakan partainya keluarga politik. Akibatnya bagi orang-orang eksternal partai akan susah untuk masuk menjadi nominasi caleg.

2) Siapa yang menyeleksi

Sesuai petunjuk dalam mekanisme KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 ayat 2 dan sesuai dengan apa hasil wawancara bahwa yang menyeleksi adalah tim seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua kaderisasi, ketua organisasi, ketua bidang hukum, AMPG dan KPPG. Namun faktanya, orang-orang yang menyeleksi di Partai

⁹ Richard S. Katz dan William Crotty, 2014. Handbook Partai Politik Hal: 649.

Golkar Sulawesi Selatan adalah orang-orang yang berasal dari keluarga politik. sehingga memungkinkan untuk pasti meloloskan kerabatnya atau keluarganya.

3) Dimana kandidat diseleksi

Kandidat sendiri diseleksi di Kota Makassar tepatnya di sekretariat DPD Golkar di Makassar.

4) Bagaimana kandidat diputuskan

Dalam pemutusan siapa yang lolos, terlepas dari diserahkan ke pimpinan kecamatan, lalu rekomendasi DPD 2 Golkar dan ditetapkan di DPD 1 Provinsi Sul-Sel akan kembali di poin ke dua bahwa orang-orang yang menyeleksi dan menetapkan ada orang yang sama sehingga akan berdampak ke orang-orang eksternal Partai apalagi bukan berhubungan dengan keluarga kerabat akan susah untuk masuk menjadi calon legislatif.

Dengan demikian, dari ketiga pembobotan dalam penentuan calon legislatif daerah menurut penulis sudah dilakukan dengan baik karena sudah dengan mekanisme sesuai dengan peraturan partai . Meskipun persyaratannya pasti bervariasi dalam setiap partai intinya yang paling penting adalah ketegasan dalam partai apabila ada salah satu anggota legislatif terlibat kasus hukum dan juga benar-benar mementingkan apa kebutuhan rakyat bukan untuk kepentingan partai ataupun pribadi

3.1.3 Penetapan Calon Beserta Nomor Urutnya

Didalam menentukan penetapan nomor urut calon, Partai Golkar dalam keputusannya mencantumkan beberapa kriteria yang menjadi pedoman dalam penyusunan nomor urut calon meskipun tidak secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya ketidakpuasan dan rasa curiga dari kader-kader yang mungkin mendapatkan hanya

memperoleh nomor besar. Adapun ketentuan penyusunan nomor urut yang tercantum dalam ketetapan DPP adalah sebagai berikut:

1. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda.
3. Nomor urut dalam daftar calon anggota legislatif, disusun memperhatikan pengurus partai yang aktif.

Penentuan nomor urut memang bisa dibilang cukup sensitif. Banyak yang beranggapan bahwa jika diletakkan paling atas maka peluang menang akan lebih besar, namun juga ada yang tidak mempercayai hal itu. Pada saat mewawancarai bapak **H. Moh.Roem,SH, M.si** tentang mekanisme pemberian nomor urut, beliau mengatakan

“ pemberian nomor urut kepada calon legislatif itu memang ada mekanisme dari partai, namun setelah itu merupakan wewenang dari KPU, itupun dilakukan oleh tim khusus yang tadi saya sebutkan dan setelah itu semua kami serahkan ke KPU”¹⁰

Namun, tanggapan itu berbanding terbalik ketika mewawancarai salah satu anggota perempuan Partai Golkar ibu Sutria Indarwangi Bakri beliau menyatakan

“ untuk pemberian nomor urut partai itu merupakan wewenang dari Partai Golkar, nanti akan disidangkan/ dirapatkan dan bagi pengurus partai punya wewenang dalam menentukan pemberian nomor urut dan untuk perempuan mengikuti aturan undang-undang ”¹¹

Dari pernyataan yang kedua jelas KPU tidak terlibat didalam penyusunan nomor urut Partai semua adalah wewenang dari partai. Untuk menguatkan lagi, peneliti berhasil bertanya dengan salah satu pengurus KPU Kota Makassar dia mengatakan

¹⁰ Wawancara dengan H. Moh. Roem, SH, M.Si (Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2014-2019), Makassar, 7 Oktober 2017

¹¹ Wawancara dengan Sutria Indarwangi Bakri (DPR Partai Golkar) Gowa, 9 Oktober 2017

“ penentuan untuk nomor urut caleg ditentukan pada pasal 7 ayat 2 tentang undang-undang pemilu nomor 8 tahun 2012 yang menyatakan bahwa daftar calon tetap disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru calon, namun tetap dari hasil konsultasi dari partai-partai tersebut”¹²

Jika membandingkan dari ketiga hasil wawancara diatas, walaupun pada hasil diserahkan oleh KPU namun tetap bahwa wewenang yang ada pada pengurus dan petinggi Golkar akan berdampak kepada penentuan nomor urut.

Tabel 3.4 Perolehan Suara Partai Golkar Dapil 7 Sulsel Pileg 2014

URUT	NAMA CALEG	KABUPATEN BONE	TOTAL PEROLEHAN
5	Suara Partai Golkar	19.878	19.878
1	Hj. RUSNI KASMAN, SH, M.Kn	23.802	23.802
2	H. A.M. YAGKIN PADJALANGI, Apt, M.Kes	59.615	59.615
3	H. M. AFIFUDDIN FATTAH, S.Pd, MH	7.452	7.452
4	Hj. ANDI BULAN NANDA, S.Sos, M.Si	7.156	7.156
5	Drs . MOH. JUSHAR HUDURI, M.Si	15.693	15.693
6	HASRIWATI RASYID, SE	2.699	2.699
7	ANDI MUHAMMAD ZUNNUN ARMIN HALID	11.481	11.481
	Total Suara Partai + Calon	147.776	147.776

Sumber: Perolehan Suara Partai Golkar Dapil 7

Ket. Kuning: lolos

Dari tabel diatas merupakan salah satu contoh yang jelas menunjukkan bahwa penentuan nomor urut sedikit kemungkinan disesuaikan dengan abjad nama, dan yang menentukan dalam pemberian nomor Partai adalah kewenangan dari Partai itu sendiri. Namun sangat disayangkan kekuatan dari KPU sendiri sangat lemah dalam penentuan nomor urut partai.

¹² Wawancara dengan pengurus KPU Kota Makassar, 10 Oktober 2017

Sesuai dengan apa hasil wawancara mengenai penentuan nomor urut yang diberikan mengikuti abjad pada nama harus dikembalikan lagi keputusan pada partai Golkar.

3.2 Fenomena Politik Kekerabatan Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Legislatif 2014

Pada saat proses pemilihan calon legislatif DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten di Sulawesi Selatan dianggap berjalan lancar. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu, dinilai angka golput masyarakat di Sulawesi Selatan menurun dibandingkan pemilihan-pemilihan umum dari tahun sebelumnya. Namun sayangnya dari hasil penetapan pemenang dalam pemilu legislatif tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa yang diajukan oleh partai diwarnai dengan relasi keluarga pejabat publik. Hal ini banyak membuat pro dan kontra terhadap keputusan partai politik.

Bagi yang kontra terhadap fenomena ini pasti akan menyalahkan partai politik yang mengusung calon-calon tersebut dengan mekanisme yang buruk, sedangkan bagi yang pro akan menyatakan hal ini sah-sah saja selama tidak menimbulkan kasus KKN, seperti yang dikatakan bapak **H. Moh. Roem, SH, M.Si**

“ bagi saya, dinasti politik sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan. Tidak cuma di Sulawesi Selatan tapi di negara-negara besarpun saya kira dinasti itu ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari dulu sampai sekarang kalau mau dibilang Sulawesi Selatan itu banyak dinastinya, karena apa? Karena kita ini terlalu melekat dengan suku dan kedekatan-kedekatan emosional lainnya. Dinasti itu tidak bisa dicegah tapi menurut saya bagaimana cara rekrutmennya partai politik harus benar-benar baik, misalkan calonnya jangan itu-itu terus kalau ada yang lebih baik mungkin bisa diganti”¹³

¹³ Wawancara dengan H. Moh. Roem, SH, M.Si (Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2014-2019), Makassar, 7 Oktober 2017

Pernyataanya ketika ditanya mengenai dinasti politik. Kemudian sama halnya pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu masyarakat yaitu:

“sekarang, kalau menurut saya kita tidak bisa menyatakan ini dinasti atau bukan, karena kita inikan pemilihan umum. Dan cara masing-masing baik itu caleg, bupati, dan gubernur sekalipun beda-beda cara menarik simpati ke masyarakat. Kemudian ini bukti bahwa kalau biar keturunannya siapa tapi kalau dicintai masyarakat pasti dipilih dan begitupun sebaliknya, tapi yang dipertanyakan kenapa didalam partai banyak sekali keluarganya dan pada saat pemilihan dia ikut mencalonkan lalu lolos, dan itu bukan di Partai Golkar saja tapi, semua partai saya kira ada, nah ini yang bikin bingung, dan ini tidak bisa dicegah hanya kita berharap semoga partai-partai itu bisa memperbaiki sistemnya baik itu rekrutmennya, cara kadernya dan lain-lain asal tidak selalu mengarah ke yang namanya dinasti”¹⁴

Dari kedua pernyataan di atas, bahwa jelas di Sulawesi Selatan fenomena dinasti politik akan semakin kuat dan sulit untuk diruntuhkan. Kedua pernyataan di atas juga hampir sama dari pengamat Amerika, Jeffrey A. Winters berpendapat bahwa “oligarki dan demokrasi beroperasi dalam satu sistem, dan politik amerika adalah penampakan sehari-hari interaksi keduanya”¹⁵. Demokrasi dan Dinasti Politik adalah saudara kembar yang menyatu dalam cairan darah pada politik modern.

Semakin demokratis suatu sistem, semakin terbuka proses politik yang dijalankan maka faktanya semakin menunjukkan menguatnya basis klan. Anggapan lain juga menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan kuatnya dinasti politik yang ada di Sulawesi Selatan seperti yang dinyatakan salah satu masyarakat:

“waktu pemilu 2014 kemarin, banyak sekali memang anaknya, istrinya dan keluarganya pokoknya yang lolos masuk jadi caleg. Tapi saya juga bingung apakah itu memang asli dari

¹⁴ Wawancara dengan masyarakat, Gowa, 10 Oktober 2017.

¹⁵ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy and Democracy*, dalam *The American Interest*, November-Desember 2011. (Northwestern University, Illinois: Cambridge University Press, 2011).

masyarakat atau ada penyalahgunaan kekuasaan ini pertanyaan juga yah dari saya bukan pernyataan”¹⁶

Pernyataan selanjutnya dari Direktur Eksekutif Center For Information & Cultural Studies (CICS) Makassar Hidayat Nahwi Rasul dalam diskusi warung kopi phoenam beliau menyatakan

“ politik dinasti di Sulawesi Selatan menunjukkan kualitas demokrasi di Sulsel yang sangat pragmatis dan masih dominanya pemilih tradisional. Mereka memilih kandidat karena kecenderungan kedekatan suku, agama, kelompok dan figur tertentu. Kita masih pesimis belum melahirkan aktor demokrasi yang berkualitas di Sulsel, politik klan di Sulses berbeda dengan politik klan di Amerika Serikat. Kita sulit menemukan ketrwakilan kepentingan rakyat dan program pembangunan yang akan datang, dominasi klan tertentu di Sulsel membuktikan parpol tidak menjalankan fungsi pendidikan politik pada warga”¹⁷

Tidak hanya Partai Golkar, pada saat pemilu 2014 tahun lalu jika melihat masing-masing Partai nama-nama klan tertentu pasti muncul, data parlemen dari hasil pemilu tahun 2014 yang berwajah keluarga seperti yang ditampilkan dalam tabel 2.6 mengenai fenomena dinasti politik pemilu 2014 menjadi bukti bahwa bukan hanya dari partai golkar namun ada juga dari partai-partai lain dari masing-masing daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam pengambilan keputusan Partai Golkar, bagi para penguasa partai memang sangat kesempatannya untuk memberikan tanggapan dan suara mengenai masalah-masalah dalam. Namun yang menjadi masalah petinggi-petinggi Golkar juga banyak dari keturunan Klan. Seperti yang data yang dibawah ini:

Tabel 3.2 nama-nama kekerabatan politik dalam pengurus partai Golkar Sulawesi Selatan masa jabatan 2012.

¹⁶ Wawancara dengan masyarakat, Gowa 12 Oktober 2017

¹⁷ Diakses melalui <http://makassar.tribunnews.com>.Tribunnews, Makassar, 14/8/2017.

No	Nama	Hubungan Kekerbatan	Jabatan di Partai	Partai Pengusung
1.	Klan Limpo	Haris yasin Limpo	Wakil ketua bidang pembangunan daerah dan pedesaan	Partai Golkar
		Adnan Purichta IYL	Wakil ketua bidang pendidikan cendekiawan dan kebudayaan	
		Ichsan Yasin Limpo	Bendahara	
2.	Muhammad Rizha	anak Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi	Ketua biro insfrakstruktur transportasi dan kemaritiman	Partai Golkar
3.	Sofyan Syam	anak Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid	Ketua biro Hub. Kerja sama Ormas dan Politik kepertaian	Partai Golkar
4..	Andi Fauziah Pujiwatie Hatta	anak Bupati Luwu Timur	DPR RI	Partai Golkar
5.	Klan Padjalangi	H.A.M. Yagkin Padjalangi	Wakil Koordinator bidang politik hukum dan kemanan	Partai Golkar
6..	Fahrudin Rangga	adik Bupati Takalar	Wakil Bendahara	Partai Golkar

Sumber: <https://sulsel.partaigolkar.or.id>

Dari data diatas menjelaskan bahwa nama-nama yang paling banyak mendapat posisi besar di partai Golkar adalah dari klan Limpo. Bukti data di atas juga menunjukkan bahwa kenapa klan Limpo sangat besar dan juga eksis di dunia politik Sulawesi Selatan terutama di DPD 1

Golkar Sulawesi Selatan , karena klan ini juga sangat berpengaruh dalam tubuh Partai Golkar itu sendiri. Nama-nama yang lain bukan berarti para keturunannya tidak masuk dalam pengurus partai hanya saja kebanyakan menjadi pengurus di daerah masing-masing.

Dari analisis diatas maka terbukti bahwa dinasti politik terutama didalam tubuh partai Golkar didukung oleh partainya sendiri. Walaupun memang tidak semua nama yang ada dalam parta Golkar masuk dalam kedalam kekerabatan politik. Namun untuk bersaing dengan keluarga Klan akan susah apabila anggota tersebut tidak aktif dalam pendekatan-pendekatan emosional, tidak mampu dalam pelobian politik dan kalah eksis dengan para anggota-anggota keluarga kekerabatan. Namun, sekarang dengan bergantinya para pengurus baru mampu mengurangi adanya kepentingan kekerabatan dan menjadikan partai Golkar sebagai partai yang bukan didominasi klan tertentu.